

# ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

**Hady Sutjipto**

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta

([hadysutjipto@untirta.ac.id](mailto:hadysutjipto@untirta.ac.id))

**Stania Cahaya Suci**

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta

([staniacs@untirta.ac.id](mailto:staniacs@untirta.ac.id))

**Yogi Sabarudin Umbara**

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta

([yogisabarudinumbara@gmail.com](mailto:yogisabarudinumbara@gmail.com))

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh derajat otonomi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja modal di 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel dengan model estimasi *fixed effect model* (FEM). Penentuan sampel berdasarkan data panel yang terdiri dari data *time series* periode 2014-2017 dan data *cross section* 34 Provinsi di Indonesia. Adapun data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) derajat otonomi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. (2) derajat otonomi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**Kata kunci:** Belanja Modal, Derajat Otonomi Fiskal, Jumlah Penduduk, Ketergantungan Keuangan Daerah

## Abstract

*The aims of this study to determine the effect of the degree of fiscal autonomy, regional financial dependence, and population on capital expenditure of 34 provinces in Indonesia. The Methodology in this study employs panel data analysis method with fixed effect model (FEM) estimation model. Determination of samples based on panel data consisting of time series data for period 2014-2017 and cross section data of 34 Provinces in Indonesia. The data was obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Financial Balance. The results shows that (1) the degree of fiscal autonomy, regional financial dependence, and the population have a positive and significant effect on capital expenditure (2) the degree of fiscal autonomy, regional financial dependence, and the total population have simultaneous effect on capital expenditures.*

**Keywords:** Degree of Fiscal Autonomy, Regional Financial Dependency, Total Population, Capital Expenditure.

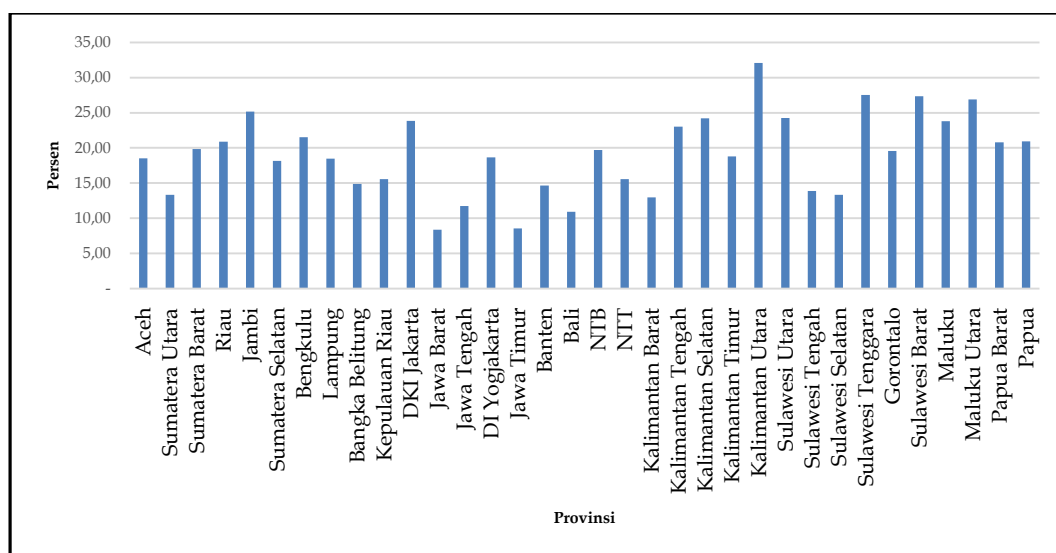
## 1. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah di Indonesia didasarkan

pada Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Secara umum, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sehingga keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

**Gambar 1**  
**Rata-Rata Belanja Modal pada 34 Provinsi di Indonesia**  
**Tahun 2014-2017 (%)**



Sumber : Badan Pusat Statistik RI (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1, belanja pemerintah provinsi di seluruh Indonesia menurut jenis belanja tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa rata-rata setiap

tahunnya belanja modal dibawah 30%, lebih rendah daripada belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Hal ini belum memenuhi amanat PP No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010-2014 dan target dalam RPJMN tahun 2015-2019 dimana secara keseluruhan belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah.

Padahal belanja modal merupakan belanja yang produktif yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam menyusun anggarannya pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Mardiasmo, 2009).

Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Aset tetap dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Belanja modal meliputi antara lain adalah belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya ( Badrudin, 2012).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah di era otonomi memerlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolok ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya, salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan (Halim 2007:230). Rasio tersebut yaitu, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pembiayaan SILPA dan Rasio Ruang Fiskal.

Ellyia dan Safri (2016) dalam penelitiannya menggunakan variabel derajat otonomi fiskal dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa derajat otonomi

fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Praza (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Demikian juga hasil penelitian Marlina (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan (berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Laju Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014 dan 2017 berdasarkan data BPS, bahwa secara hampir keseluruhan provinsi terjadi penurunan nilai derajat otonomi fiskal pada tahun 2017 dibandingkan dengan nilai derajat otonomi fiskal pada tahun 2014. Sementara itu, nilai derajat otonomi fiskal Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai derajat otonomi fiskal paling tinggi diantara provinsi yang lainnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 66,42 persen sedangkan nilai derajat otonomi terendah yaitu Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebesar 0,78 persen.

Selanjutnya ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah rasio ketergantungan keuangan daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2007). Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Sularso dan Restianto, 2011).

Di Indonesia bentuk transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi sebuah pendapatan dalam APBD yaitu dana perimbangan. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintahan daerah, melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transfer dari pemerintah pusat ini akan dibelanjakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan

pedoman dan sektor-sektor yang telah ditetapkan termasuk pengalokasian belanja modal.

Laju ketergantungan keuangan daerah pada 34 Provinsi di Indonesia tahun 2014 dan 2017 berdasarkan data BPS, maka dapat dilihat pada tahun 2017 kondisi ketergantungan keuangan daerah mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 kecuali Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, nilai ketergantungan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki nilai ketergantungan keuangan daerah paling tinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 83,57% persen sedangkan nilai ketergantungan keuangan daerah Provinsi Jawa Barat memiliki nilai terendah yaitu sebesar 10,44 persen.

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan pelayanan publik disetiap daerah. Pengeluaran Belanja daerah dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah, apabila perkembangan jumlah penduduk semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar. Karena meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan (Gorahe, Masinambow dan Engka : 2014).

Perkembangan jumlah penduduk pada 34 provinsi di Indonesia berdasarkan data BPS, bahwa selama tahun 2014-2017 jumlah penduduk di sepuluh provinsi terus mengalami kenaikan yang cukup besar. Jika melihat data tersebut maka jumlah penduduk di semua wilayah tiap tahun semakin meningkat terutama di provinsi yang berada di pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia maka dari itu seharusnya penyediaan fasilitas publik juga harus meningkat tiap tahunnya melalui belanja pemerintah yaitu belanja modal.

Penelitian ini merupakan bagian dari evaluasi kinerja keuangan daerah dimana variabel desentralisasi fiskal, ketergantungan keuangan, dan jumlah penduduk dalam mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah. Implikasi dari

penelitian ini, dapat memberikan analisis yang mendalam untuk memecahkan masalah ekonomi regional mengenai belanja modal yang masih rendah serta arah kebijakan apa yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah, khususnya terkait peningkatan belanja modal.

## 2. Tinjauan Pustaka

Adolf Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam presentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di Negara-negara Eropa, U.S dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum yang disebut dengan *The Law of ever increasing State Activities* atau hukum makin meningkatnya pengeluaran negara.

Menurut Peacock dan Wiseman mengemukakan sebuah teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Perkembangan pengeluaran Negara bentuk steplike disebabkan tiga efek yang saling berhubungan, yaitu *displacement effect*, *inspiration effect*, dan *concentration effect*. *The Displacement Effect* dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar tersebut.

Elliya dan Safri (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sedangkan Praza (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Demikian juga hasil penelitian Marlina (2017) menunjukkan bahwa kinerja keuangan (berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan pihak principal yang memberikan tugas legislatif (DPRD) untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi eksekutif (pemerintah daerah) yang menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kepentingan atau pelayanan public (pemerintah Daerah) harus benar-benar mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya (Huda,2015). Meningkatnya jumlah penduduk

menuntut konsekuensi logis adanya peningkatan sarana dan prasarana umum, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Karena seiring dengan semakin besarnya jumlah penduduk maka barang dan jasa yang dibutuhkan juga makin besar dan memerlukan anggaran yang besar dalam membiayai kebutuhan tersebut.

### 3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini meliputi nilai belanja modal pada 34 Provinsi di Indonesia. Melihat luasnya pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal di 34 provinsi tersebut, maka dalam penelitian ini memfokuskan variabel dependennya (Y) adalah belanja modal pada 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan variabel independennya adalah derajat otonomi fiskal sebagai ( $X_1$ ), ketergantungan keuangan daerah sebagai ( $X_2$ ) dan jumlah penduduk sebagai ( $X_3$ ).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh dari pihak kedua atau data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2007).

Penelitian ini menggunakan jenis data panel yaitu gabungan antara data *time series* (selama 4 tahun, yakni 2014 – 2017) dan data *cross section* untuk 34 provinsi di Indonesia sehingga membentuk jumlah data yang di observasi sebanyak 136 data. Data dalam penelitian ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dimana data tersebut meliputi belanja modal, derajat otonomi fiskal, ketergantungan keuangan daerah dan jumlah penduduk.

Dalam menunjang penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model panel data, karena penelitian ini memiliki 34 *cross section* (34 provinsi di Indonesia) yang berbeda pada periode waktu yang sama. Menurut Gujarati dan Porter (2015), menyatakan untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari suatu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu.

Berdasarkan data panel, unit data *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Berdasarkan dalam model panel data, persamaan model dengan menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{LnBMit} = \beta_0 + \beta_1 \text{DOFit} + \beta_2 \text{KKDit} + \beta_3 \text{JPit} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

LnBM = Logaritma natural Belanja Modal

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

KKD = Ketergantungan Keuangan Daerah

JP = Jumlah Penduduk

$\beta_0$  = Intersep

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi/*Slope*

$\epsilon_{it}$  = Error term di waktu  $t$  untuk unit *cross section*  $i$

$i$  = Jumlah *cross section* terdiri dari 34 provinsi di Indonesia

$t$  = Menunjukkan periode waktu yaitu dari tahun 2014 – 2017

Uji hipotesis penelitian dapat dilakukan dengan cara uji signifikan atau pengaruh nyata antar variabel independen terhadap variabel dependen. Uji signifikan merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari basil hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikan adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah  $H_0$  dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2015).

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*Coomon Effect Model*), pendekatan Efek tetap (*Fixed Effect Model*) dan pendekatan efek acak (*Random Effect Model*). Penelitian ini menggunakan sebagai model terbaik, melalui pengujian statistik, yaitu *Chow Test* (pemilihan model terbaik antara CEM dan FEM) dan *Hausman Test* (pemilihan model terbaik antara FEM dan REM).

Hasil *Chow Test* diketahui nilai probabilitas *cross section*  $f$  sebesar  $0.0000 < 0,05$  ( $\alpha$ ). karena nilai probabilitasnya dibawah alpha. Sehingga  $H_0$  ditolak, maka model terbaik menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM). Demikian pula hasil *Hausman Test* diketahui bahwa probabilitas Hausman Test sebesar  $0,0000 < 0,05$ , maka tolak  $H_0$ .



Artinya model yang digunakan untuk mengestimasi model penelitian ini menggunakan *fixed effect model (FEM)*.

Berdasarkan output estimasi regresi data panel dengan *Fixed Effect Model* (FEM) dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Regresi Panel Data**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.13795	1.268627	12.72080	0.0000
DOF?	0.017356	0.006029	2.878960	0.0049
KKD?	0.011933	0.002433	4.905712	0.0000
JP?	4.30E-07	1.60E-07	2.684317	0.0085

Sumber : Hasil pengolahan data melalui *Eviews 8*

### 1. Pengaruh Derajat Otonomi Fiskal terhadap Belanja Modal

Variabel derajat otonomi fiskal memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan setelah dilakukannya pengujian hipotesis dimana nilai t-hitung variabel derajat otonomi fiskal lebih besar dari nilai t-tabel, serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat kepercayaan  $\alpha = 0,05$  (5%). Besarnya pengaruh derajat otonomi fiskal terhadap belanja modal sebesar 0.017356. Artinya, Peningkatan derajat otonomi fiskal masing-masing provinsi sebesar 1% akan menaikkan nilai belanja modal sebesar 0.017356% dengan asumsi variabel lain adalah *ceteris paribus*.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Adolf Wagner yaitu mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum yang disebut dengan *The Law of ever increasing State Activities* atau hukum makin meningkatnya pengeluaran Negara, hukum Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hal tersebut dapat terjadi karena derajat otonomi fiskal menggambarkan bagaimana kemandirian dari daerah tersebut atau memberikan gambaran kemampuan dari internal daerah dalam kontribusinya terhadap penerimaan daerah dalam APBD. Dimana derajat otonomi fiskal merupakan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huda (2015), Praza (2016), dan Marlina dkk.(2017) yang memberikan hasil bahwa

variabel derajat otonomi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal.

## **2. Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal**

Setelah dilakukannya pengujian hipotesis dimana nilai t-hitung variabel ketergantungan keuangan daerah lebih besar dari nilai t-tabel, serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat kepercayaan  $\alpha = 0,05$  (5%). Maka, variabel ketergantungan keuangan daerah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Adapun besarnya pengaruh ketergantungan keuangan daerah terhadap belanja modal sebesar 0.011933. Artinya, peningkatan ketergantungan keuangan daerah masing-masing provinsi sebesar 1% akan menaikkan nilai belanja modal sebesar 0.011933% dengan asumsi variabel lain adalah *ceteris paribus*.

Tidak semua daerah sudah mampu mandiri dan tidak ketergantungan pada pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi, disadari bahwa sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada daerah akan menghadapi kesulitan. Oleh karena itu akibatnya kemandirian keuangan daerah juga rendah dan akhirnya pemerintah daerah menjadi tidak mandiri atau ketergantungan pada pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan hasil penelitian berkenaan dengan variabel ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Peacock dan Wiseman yang mengemukakan bahwa perkembangan pengeluaran negara disebabkan tiga efek yang saling berhubungan, yaitu *displacement effect*, *inspection effect*, dan *concentration effect*. Dengan adanya desentralisasi terjadi konsekuensi dimana adanya urusan pemerintah pusat dilakukan oleh pemerintah daerah. Penambahan urusan ini menambahkan pengeluaran daerah oleh karenanya menyebabkan pemerintah pusat harus memberikan transfer kepada pemerintah daerah yang selanjutnya oleh pemerintah daerah dimasukkan dalam penerimaan APBD dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, hal inilah yang disebut sebagai *Concentration effect*.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2013) yang memberikan hasil bahwa variabel ketergantungan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal.

### **3. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal**

Variabel jumlah penduduk memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis dimana nilai t-hitung variabel jumlah penduduk lebih besar dari nilai t-tabel, serta nilai probabilitasnya lebih kecil dari tingkat kepercayaan  $\alpha = 0,05$ . Adapun besarnya pengaruh jumlah penduduk terhadap belanja modal sebesar  $4.30E-07$ . Artinya peningkatan jumlah penduduk masing-masing provinsi sebesar 1000 jiwa akan menaikkan nilai belanja modal sebesar 0,0043 % dengan asumsi variabel lain adalah *ceteris paribus*, dan sebaliknya.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bagus Setya Budi (2013) dan Gorahe, Masinambow dan Engka (2013) yang memberikan hasil bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan barang publik, sedangkan penyediaan barang dan jasa erat kaitannya dengan alokasi belanja modal, untuk itu pemerintah daerah harus memperhatikan aspek regional dan kependudukan dalam penentuan penyediaan barang dan jasa pemerintah. Semakin besar penduduk suatu daerah maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik lebih baik, dengan adanya tuntutan tersebut maka pemerintah akan terdorong untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan hasil penelitian berkenaan dengan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa belanja modal belanja pemerintah provinsi di seluruh Indonesia menurut jenis belanja tahun

2014-2017 menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya belanja modal di bawah 30%. Adapun variabel derajat otonomi fiskal, ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap belanja modal pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2014-2017.

## 5.2. Saran

Pemerintah daerah provinsi tetap harus meningkatkan penerimaan asli daerahnya melalui potensi-potensi yang ada di tiap tiap daerah administrasinya hal ini dikarenakan dengan meningkatnya penerimaan asli daerah maka daerah dapat secara lebih leluasa dalam melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya dalam rangka memberikan pelayanan publik untuk masyarakat.

Ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang membandingkan jumlah pendapatan transfer yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah di 34 provinsi di Indonesia terhadap total penerimaan dalam APBD. Implikasinya terhadap pemerintah daerah yaitu dana transfer ini merupakan sebagai pemicu kemandirian suatu daerah sebagai langkah awal keberhasilan otonomi daerah. Sehingga dengan alokasi dana tersebut, pemerintah daerah dapat bergerak aktif dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi dalam menaikkan presentase penerimaan PAD dan menurunkan alokasi dari pemerintah.

Jumlah penduduk yang selalu meningkat setiap tahunnya di seluruh provinsi memberikan konsekuensi untuk pemerintah provinsi tersebut untuk terus melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah provinsi terus berupaya meningkatkan anggaran belanja modal dalam APBD guna meningkatkan layanan bagi penduduk terutama pembangunan melalui pengadaan asset dalam belanja modal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam model yang masih sederhana. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar melakukan pengembangan-pengembangan model simultan maupun metode analisis Data Panel Dinamis, serta menambahkan variabel-variabel independen lain terutama variabel-variabel makro

seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2014-2018). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi tahun 2014-2019. Badan Pusat Statistik
- Badrudin, Rudy.(2012). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Elliya.A, Safri.M.(2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol.4 ISSN: 2338-4603. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi . Jambi
- Gorahe, Masinambow.V dan Engka.E.(2014) Analisis Belanja Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Provinsi Sulawesi Utara, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, vol 14 no.3 tahun 2014
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter.(2015). Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Hidayat, Fajar.(2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang
- Huda, Syahrul, dkk.(2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, *Fiscal Stress*, dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. Jurnal ASSETS. Volume 5 Nomor 2: 1-12
- Kuncoro,Mudrajad.(2004). Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, strategi, dan Peluang. Jakarta : Erlangga
- Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta, Penerbit Andi.

- Marlina.L, Indriani.M, Fahlevi.H.(2017). Kinerja Keuangan dan Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah. Volume 6, No.1.Februari 2017.pp21-30
- Praza, Eko Indra. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah.Vol.4 No.1
- Sukirno, Sadono.(2002). Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press : Jakarta
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto.(2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011
- Suparmoko, M.(2002). Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembanguna Daerah. Andi. Yogyakarta